

Analisis Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Reni Widianingsih¹, Noviansyah Rizal², Fetri Setyo Liyundira³

STIE Widya Gama Lumajang ¹²³

Email: reniwidianingsih08@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Volume 2

Nomor 1

Bulan September

Tahun 2019

Halaman 70-74

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin di capai adalah mengetahui bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Karena sering kali yang kita lihat realisasi tidak sesuai dengan target maka pengoptimalan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif perlu dilakukan. Berdasarkan hal ini tentang pentingnya mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu APBD Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang periode anggaran 2016 hingga 2018. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang berada pada tingkat manajemen keuangan desa yang kurang efisien. Sementara itu, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang berada pada tingkat efektif pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan yaitu Agar belanja Desa Pulo lebih efisien, maka Pemerintah Desa dalam hal ini perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif dan membuat perencanaan yang matang, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan, penganggaran yang sesuai dengan standar harga/biaya yang berlaku.

Kata kunci: Efisiensi, Efektivitas dan Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

This study has a goal to be achieved is to find out how the level of efficiency and effectiveness of village financial management in Pulo Village, Tempeh District, Lumajang Regency. Because often what we see is not in accordance with the target, the optimization of efficient and effective regional financial management needs to be done. Based on this about the importance of optimizing the budget efficiently and effectively in village financial management, the authors are interested in analyzing how the efficiency and effectiveness of village financial management in Pulo Village, Tempeh District, Lumajang Regency. The data used are secondary data, namely the APBD of Pulo Village, Tempeh District, Lumajang Regency, the 2016 budget period until 2018. The research method used by researchers in this study is descriptive method with a quantitative approach. The results of this study indicate that the level of efficiency of village financial management in Pulo Village, Tempeh District, Lumajang Regency is at the level of village financial management that is less efficient. Meanwhile, the level of effectiveness of village financial management in Pulo Village,

Tempeh District, Lumajang Regency is at the effective level of village financial management. Based on the research conducted and the conclusions obtained, the suggestions that can be conveyed are that in order for Pulo Village's expenditure to be more efficient, the Village Government in this case needs to study productive sectors with less productive sectors and make careful planning, sustainable and in accordance with needs, budgeting in accordance with applicable price / cost standards

Keyword: Efficiency, Effectiveness and Management of Village Finance

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa Otonomi daerah merupakan suatu bentuk rancangan yang digunakan untuk menyalurkan segala perkara dan berhubungan tentang kepentingan didalam suatu daerah untuk memberikan takaran lebih kepada daerah tersebut agar mampu atau bisa mengelola sendiri potensi sumber daya masing- masing yang dimiliki di setiap daerah.

Dalam mengelola keuangan desa harus memenuhi prinsip dan asas yang sebelumnya sudah diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Keuangan Desa harus diolah dengan prinsip yang terbuka, akuntabel, partisipan serta dilakukan secara teratur dan tepat dalam penganggarannya”, dengan demikian pemerintah desa memiliki beberapa penerimaan dari sumber-sumber yang di mana penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilakukan di desa.

Pengelolaan keuangan desa akan di turunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah suatu rancangan keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang sudah dipresentasikan dan diterima sebelumnya oleh aparat desa dan Permusyawaratan desa (BPD) dan telah di tetapkan sesuai dengan peraturan yang ada di desa.

Desa yang menjadi suatu daerah otonom tingkat terendah dengan sendirinya akan menjadi hal pokok dalam berlangsungnya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Efisien ialah pencapaian dari suatu proses yang terbesar dengan menggunakan pengeluaran yang paling rendah guna mencapai *output* tertentu. Efisiensi adalah suatu perbandingan antara *output* dan input yang terkait dengan target atau ketentuan kinerja yang sudah di tetapkan. Efektivitas merupakan suatu bentuk yang dicapai dari hasil kerja dengan target yang sudah di rencanakan sebelumnya.

Di Desa Pulo seiring dengan berjalannya waktu pasti akan terus melakukan yang namanya perubahan, sebagaimana yang telah di targetkan sebelumnya, hal itu pasti berdampak dalam pengelolaan dananya yang juga pasti akan mengalami peningkatan termasuk anggaran untuk belanja, pada saat ini yang terlihat banyak sekali dilakukan pembangunan desa seperti pengadaan akses jalan desa, kegiatan penambahan jaringan air serta semakin di tingkatkannya dalam pembinaan masyarakat seperti kegiatan pembinaan karang taruna, kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK) dan juga ada kegiatan insetif untuk RT/RW, Sehingga dalam pengelolaan dananya perlu dioptimalkan karena pastinya banyak anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatannya, dengan banyaknya kegiatan tersebut memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Berkaitan dengan hal itu maka kegiatan beserta kinerja proyek adalah faktor yang sangat membantu untuk pengoptimalan pengelolaan keuangan desa Pulo.

Penelitian mengenai keterkaitan anggaran dengan kinerja instansi sektor publik sudah banyak dilakukan sebelumnya, Siregar & Syam, (2017)meneliti tentang Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Yang Ada Di Kabupaten Deli Serdang). Penelitian Novita, (2016) tentang Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Penelitian Sitompul, (2016) tentang Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Bengkayang. Penelitian Rondonuwu at all, (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis apakah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian Trianto, (2014) dalam melakukan penelitian ini dengan tujuan dapat menganalisis bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas keuangan daerah di Kota Palembang.

Karena sering kali yang kita lihat realisasi tidak sesuai dengan target maka pengoptimalan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif perlu dilakukan. Berdasarkan hal ini tentang pentingnya mengoptimalkan

anggaran secara efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo Kecamatan Tempeh

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang dapat menggambarkan secara terperinci tentang analisisnya setelah meneliti berdasarkan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya di lapangan. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder data yang didapat melalui media yang lain/ perantara secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak yang lain). Kemudian data tersebut adalah data Laporan Keuangan Kantor Desa Pulo yang berupa APBDes.

a. Definisi Operasional

1. Rasio Efisiensi

Mengukur efisiensi dapat dengan menggunakan rasio *input* dan *output*. Jika tingkat efisiensi semakin tinggi maka *output* semakin besar dibandingkan dengan *input* dalam suatu organisasi. Efisiensi pengelolaan keuangan desa dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi belanja desa terhadap realisasi pendapatan desa dikalikan dengan seratus dalam bentuk presentase.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100 \%$$

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah gambaran suatu bentuk kemampuan dari pemerintah desa dalam membandingkan realisasi pendapatan asli desa dengan target pendapatan asli desa yang kemudian dikalikan seratus dalam bentuk presentase. Apabila tingkat rasio, efektivitas semakin tinggi, maka menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan Asli Desa}} \times 100 \%$$

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara menghitung Rasio Efektivitas Keuangan Desa dan Rasio Efisiensi Keuangan Desa seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Desa diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri Melalui Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan

No	Presentase Kinerja Efisiensi Keuangan	Kriteria
1	100% keatas	Tidak efisien
2	90 - 100%	Kurang efisien
3	80 - 90%	Cukup efisien
4	60 - 80%	Efisien
5	Kurang 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327/1996

Kemudian untuk kriteria rasio keuangan desa juga diambil dari Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Tabel berikut yang menggambarkan kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Desa.

Tabel 2 Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan

No	Presentase Kinerja Efektivitas Keuangan	Kriteria
1	100% keatas	Sangat efektif
2	90 - 100%	Efektif
3	80 - 90%	Cukup efektif
4	60 - 80%	Kurang efektif
5	Kurang 60%	Tidak efektif

Sumber: *Keppmendagri Nomor 690.900.327/1996*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi Keuangan Desa

Mengukur efisiensi dapat dengan menggunakan rasio *input* dan *output*. Jika tingkat efisiensi semakin tinggi maka *output* semakin besar dibandingkan dengan *input* dalam suatu organisasi. Proses kegiatan operasional dapat disebut efisien apabila suatu kegiatan tertentu bisa dicapai hasil yang telah di tetapkan sebelumnya dengan menggunakan dana dan sumber daya yang serendah-rendahnya. Berikut tabel 3 yang menggambarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa pulo tahun anggaran 2016-2018.

Tabel 3
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Pulo Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi	Keterangan
2016	1.800.000.000	1.849.000.000	97%	Kurang efisien
2017	2.000.000.000	1.970.000.000	101%	Tidak efisien
2018	1.800.000.000	1.784.000.000	100%	Kurang efisien

Sumber data : Data diolah 2019

Berdasarkan hasil dari analisis tersebut menyatakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo pada tahun 2016 - 2018 berada pada posisi kurang efisien, dan tidak efisien , karena presentase tingkat rasio diatas 90%. Dapat dilihat pada tahun 2016 rasio presentase tingkat efisiensi rata-rata sebesar 97%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan presentase tingkat efisiensi rata-rata sebesar 101% peningkatan itu terjadi karena pada tahun tersebut pendapatan desa mengalami peningkatan, kemudian banyak dilakukannya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan penambahan saluran air , sehingga tingkat efisiensi meningkat sebanyak 4%. Kemudian pada tahun 2018 dengan presentase tingkat efisiensi mengalami penurunan rata-rata sebesar 100% karena pendapat yang diterima oleh desa menurun jadi berdampak pada realisasi belanja juga mengalami penurunan, sehingga presentase tingkat efisiensi dari tahun 2017-2018 menurun sebanyak 1%. Hal tersebut menunjukkan takaran penggunaan belanja yang melebihi 90% dari jumlah pendapatan yang tersedia.

Dapat dilihat hal tersebut adalah keadaan yang tidak efisien karena termasuk suatu pemborosan.Hal itu terjadi karena belanja pada setiap bidang mengalami peningkatan, seperti belanja pegawai yang meningkat karena penambahan jumlah pejabat, pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi yang tarifnya semakin meningkat, serta perlengkapan operasional perkantoran, pembangunan dan pemeliharaan wisata yang dimiliki desa, pembangunan sarana dan prasarana desa yang baru, misalnya: pembangunan jalan desa, gapura batas desa, dan saluran irigasi air, hal tersebut mengakibatkan aktivitas tersebut menjadi tidak cermat dalam mengakulasi keuangannya. Namun jika dilihat, pada tahun 2018 rasio tingkat efisiensi mengalami penurunan, hal ini berarti bahwa Desa Pulo dalam merealisasikan dananya cenderung baik dengan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo.

Dalam keadaan tersebut, berarti Desa Pulo dalam tiga tahun tersebut kurang efisien dalam mengelola keuangannya, karena anggaran belanja desa yang masih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan desa.Dari hasil data itu terlihat bahwa realisasi belanja tidak dimaksimalkan dengan pendapatan yang diperoleh Desa Pulo.Terlihat dari realisasi belanja yang lebih besar daripada realisasi pendapatan.

Efektivitas keuangan desa

Efektivitas adalah gambaran suatu bentuk kemampuan dari pemerintah desa dalam membandingkan realisasi pendapatan asli desa dengan target pendapatan asli desa yang kemudian dikalikan seratus dalam bentuk presentase.Apabila tingkat rasio, efektivitas semakin tinggi, maka menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik.

Tabel 4
Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Pulo Tahun 2016-2018

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Efektivitas	Keterangan
-------	--------------	---------------	-------------	------------

2016	320.000.000,00	320.000.000,00	100%	Efektif
2017	320.000.000,00	320.000.000,00	100%	Efektif
2018	280.624.000,00	280.624.000,00	100%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis tersebut menyatakan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Pulo pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berada pada tingkat yang efektif. Dari hasil tersebut juga terlihat bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Pulo telah stabil, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 100%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Pulo adalah sudah efektif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Pulo dalam merealisasikan pendapatan asli desa berdasarkan potensi nyata desa dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah sangat baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Berdasarkan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berada pada tingkat kurang efisien. Dengan presentase rasio tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa mencapai 101%. Yang berarti bahwa efisiensi pengelolaan keuangan desa pada ketiga tahun tersebut masih kurang efisien karena anggaran belanja desa yang masih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan desa.
2. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pulo selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 cenderung stabil, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 100%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Pulo adalah sudah efektif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli desa berdasarkan potensi riil desa dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Halim, Abdul. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Novita, D. (2016). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2005
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2014
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 2014
- Rondonuwu, Ritno H; Tinangon, Jantje J; Budiarmo, N. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3(4), 23–32. <https://doi.org/10.1159/000368800>
- Rosyida, Ainur. (2017). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Sumber Suko Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. STIE Widyagama Lumajang: Lumajang
- Siregar, F.A, & Syam BZ, F. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 93–106.
- Tiurma Rousmauli Sitompul. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Emba*. Retrieved From <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10580>
- Trianto, A. (2014). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang, 65–77. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah*. 2004
- Yuliansyah dan Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat